

OPTIMALISASI PERAN DINAS KOPERASI DALAM SISTEM PROGRAM PENGAWASAN PADA KOPERASI KARYAWAN BANK MEGA

Septian Dwiki Darmawan¹, Kustini Kustini²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail : 22012010048@student.upnjatim.ac.id¹ kustini.ma@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peran Dinas Koperasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi di Koperasi Karyawan Bank Mega dengan menggunakan mekanisme pengawasan koperasi. Pengurus, anggota, dan staf koperasi diwawancarai secara menyeluruh dan dikumpulkan melalui observasi. Menurut hasil yang diperoleh bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi sangat dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan oleh organisasi koperasi. Pengurus koperasi menerima pelatihan dan evaluasi teratur melalui program pengawasan, yang tidak hanya membantu menemukan masalah manajemen, tetapi juga meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Pengawasan yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan operasi dengan menyesuaikan strategi dan operasinya dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Studi ini menemukan bahwa mengoptimalkan peran Dinas Koperasi melalui pengawasan yang sistematis dan terencana dapat meningkatkan kinerja Koperasi Karyawan Bank Mega, sehingga lebih banyak manfaat bagi anggotanya. Untuk memastikan bahwa koperasi dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai tujuan jangka panjangnya, disarankan peningkatan pengawasan dan pembuatan program pelatihan yang lebih komprehensif untuk pengurus.

Kata Kunci : Dinas Koperasi, Operasional Berkelanjutan, Koperasi Karyawan, Bank Mega

Abstract

The objective of this community service is to examine how the role of the Cooperative Department can be optimized to enhance the sustainability of operations at the Bank Mega Employee Cooperative through cooperative supervision mechanisms. Comprehensive interviews were conducted with the cooperative's management, members, and staff, supplemented by observations. The results indicate that transparency and accountability in cooperative management are significantly influenced by the supervision carried out by the cooperative organization. The cooperative management team receives regular training and evaluations through supervision programs, which not only help identify managerial issues but also enhance member participation in decision-making processes. Effective supervision also enables the organization to maintain sustainable operations by aligning its strategies and activities with changes in the business environment. This study concludes that optimizing the role of the Cooperative Department through systematic and well-planned supervision can improve the performance of the Bank Mega Employee Cooperative, thereby providing greater benefits to its members. To ensure that cooperatives can address existing challenges and achieve their long-term objectives, it is recommended to strengthen supervision and develop more comprehensive training programs for the management team.

Keywords : Cooperative Department, Sustainable Operations, Employee Cooperative, Bank Mega

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan entitas ekonomi yang memiliki peranan krusial dalam pembangunan

perekonomian masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha diarahkan dan didorong untuk ikut berperan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. (Ummah, 2019). Sebagai contoh, Koperasi Karyawan Bank Mega memiliki potensi besar untuk menjadi wadah bagi karyawan untuk mengelola sumber daya dan memenuhi kebutuhan finansial dan sosial mereka. Namun, koperasi sering menghadapi tantangan yang signifikan di tengah perkembangan yang cepat dalam dunia bisnis dan perubahan kebutuhan pasar. Manajemen yang tidak efisien, ketidakjelasan, dan kurangnya partisipasi anggota dalam pengelolaan adalah beberapa masalah ini. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. (Siti, 2014). Untuk memastikan bahwa koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan efektif, peran Dinas Koperasi sangat penting.

Dalam konteks yang seperti ini, optimalisasi fungsi Dinas Koperasi melalui pengawasan menjadi sangat penting. Di bawah tanggung jawab dinas koperasi, koperasi harus diawasi dan dibantu untuk memenuhi standar operasional yang baik. Pengawasan yang efektif mencakup hal-hal selain keuangan, seperti manajemen, kepatuhan terhadap peraturan, dan partisipasi anggota. Koperasi ini didirikan guna memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia namun tidak berkembang secara maksimal karena tidak adanya support dari lingkungan sekitar. (Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, 2022). Diharapkan Koperasi Karyawan Bank Mega dapat meningkatkan kinerja dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan eksternal dengan pengawasan yang baik. Dalam perjalanannya, pengelolaan koperasi disini juga sering menghadapi banyak permasalahan. (Ariyantiningasih et al., 2023). Oleh karena itu, pengabdian ini meneliti bagaimana memaksimalkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi untuk meningkatkan operasional koperasi di masa mendatang.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis fungsi Dinas Koperasi dalam meningkatkan operasi berkelanjutan di Koperasi Karyawan Bank Mega melalui program pengawasan yang efisien. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan

prinsip Koperasi berdasarkan Pasal 62 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Indonesia, 1945). Pengabdian ini diharapkan menemukan metode yang dapat digunakan oleh organisasi koperasi untuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kemampuan pengurus, dan melibatkan anggota secara aktif dalam proses pengelolaan. Selain itu, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan saran yang dapat digunakan oleh organisasi koperasi dan pengurus koperasi saat mereka membuat kebijakan dan program pendampingan. Melalui hasil dari kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi bisa dilihat hasil dari pengawasan tersebut. Diharapkan pengabdian ini akan membantu perkembangan koperasi di Indonesia dengan menemukan masalah yang dihadapi oleh koperasi karyawan Bank Mega dan bagaimana pengawasan dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Selain itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu dinas koperasi membuat program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan koperasi di era globalisasi. Koperasi sehat merupakan predikat yang diberikan kepada koperasi yang berhasil RAT tepat waktu secara terus menerus. (Siregar et al., 2020).

Pengabdian ini memiliki banyak manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, pengabdian ini diharapkan dapat memberi tahu Koperasi Karyawan Bank Mega tentang pentingnya pengawasan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi. Dengan memahami fungsi pengawasan, anggota dan pengurus koperasi dapat lebih proaktif dalam mengelola koperasi, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan di kalangan anggota. Dengan pengawasan yang baik, koperasi juga dapat menemukan dan mengatasi masalah sebelum menjadi lebih besar, memastikan keberlangsungan bisnis. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. (Rizkiawan, 2023). Pengabdian ini dapat membantu organisasi koperasi membuat strategi pengawasan yang lebih baik. Pengabdian ini dapat membantu organisasi koperasi merancang program pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan meningkatkan kemampuan pengurus koperasi untuk melakukan tugas manajemen. Ini dapat pada gilirannya meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah melaksanakan dan pengawasan dan pemeriksaan koperasi sesuai peraturan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (Mardiana et al., 2020). Pengabdian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Anggota dan komunitas di sekitarnya akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari koperasi yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Koperasi yang kuat dapat meningkatkan lapangan kerja, menghasilkan lebih banyak uang, dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, memaksimalkan fungsi Dinas Koperasi melalui pengawasan akan berdampak baik pada koperasi dan masyarakat secara keseluruhan.

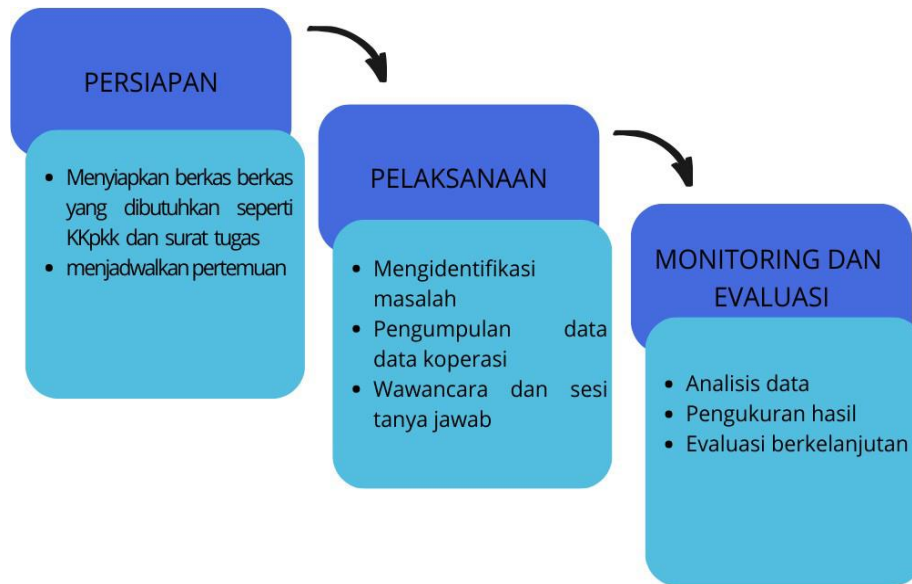
Pengabdian ini sangat penting karena koperasi semakin penting untuk ekonomi lokal dan nasional. Koperasi harus beradaptasi untuk tetap relevan dan berkelanjutan di era globalisasi, di mana tantangan dan peluang bisnis semakin kompleks. Salah satu cara terbaik untuk mengoptimalkan fungsi Dinas Koperasi adalah melalui pengawasan yang efektif. Diharapkan bahwa koperasi dapat meningkatkan operasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dengan memahami bagaimana pengawasan dapat diterapkan dengan baik. Agar pengelolaan koperasi tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka koperasi harus memiliki manajemen yang baik dalam setiap kegiatannya. (Maria Ernestina Da Rato et al., 2023). Pengabdian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis ke bidang pengelolaan koperasi dengan mempelajari bagaimana organisasi koperasi berfungsi dalam konteks pengawasan. Peneliti dan praktisi lain yang tertarik dengan pengembangan koperasi dapat menggunakan pengabdian ini sebagai referensi.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami peran Dinas Koperasi dalam meningkatkan keberlanjutan koperasi karyawan Bank Mega dengan mengawasi koperasi. Kajian dimulai dengan persiapan menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti surat tugas, kertas kerja penilaian kesehatan koperasi, dan tentunya jadwal temu dengan koperasi selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan menentukan masalah yang dihadapi koperasi dari sudut pandang manajemen, operasional, dan anggota. Pengurus, anggota, dan perwakilan dari Dinas Koperasi diwawancarai secara menyeluruh untuk

mendapatkan data. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pengalaman mereka, pendapat mereka, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, serta masalah yang mereka hadapi dalam operasi sehari-hari. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang dinamika internal koperasi dan bagaimana pengawasan digunakan dalam praktik. Dengan melakukan observasi langsung, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola interaksi dan pengambilan keputusan yang terjadi di dalam koperasi, serta bagaimana pengawasan berkontribusi terhadap operasional yang lebih baik.

Setelah tahap pengumpulan data selesai, langkah berikutnya adalah analisis data. Analisis ini dilakukan dengan teknik analisis tematik, di mana peneliti akan menemukan topik utama dari data yang mereka kumpulkan. Data yang dikumpulkan dari wawancara akan ditranskripsikan dan dikelompokkan menurut tingkat efektivitas pengawasan, transparansi manajemen, dan keterlibatan anggota. Peneliti akan melakukan pembacaan berulang transkrip untuk memahami konteks data dan menemukan pola yang menunjukkan hubungan antara pengawasan Dinas Koperasi dan kinerja Koperasi Karyawan Bank Mega. Hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan temuan utama dan saran yang diharapkan tentang cara meningkatkan pengawasan dan kinerja koperasi di masa mendatang. Dengan pendekatan ini, pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Dinas Koperasi dan bagaimana pengawasan yang efektif dapat mendukung operasional berkelanjutan.



Gambar 1. Tahapan Proses Pengawasan Koperasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi mengawasi Koperasi Karyawan Bank Mega secara signifikan. Wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pengawasan rutin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi. Para pengurus koperasi mengatakan bahwa laporan pengawasan yang jelas dan terorganisir membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana dana digunakan dan bagaimana program koperasi dapat dilanjutkan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga membantu pengurus mengelola koperasi dengan lebih baik.

Selain itu, data menunjukkan bahwa dengan pengawasan dari Dinas Koperasi, keterlibatan anggota dalam pengelolaan koperasi meningkat. Pengurus mengatakan bahwa anggota lebih sering terlibat dalam pengambilan keputusan, terutama tentang penggunaan anggaran dan perencanaan program. Dengan mengatasi permasalahan ini, koperasi dapat memperkuat manajemen keanggotaan mereka dan memajukan tujuan bersama mereka secara efektif. (Fauziah et al., 2023). Dengan demikian, pengawasan dari Dinas Koperasi mendorong budaya

partisipatif di dalam koperasi. Karena mereka merasa lebih dimiliki dan bertanggung jawab atas koperasi, anggota lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan koperasi. Peningkatan partisipasi anggota ini menjadi salah satu komponen penting dalam membangun operasional yang lebih berkelanjutan. Pengawasan ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Pelaksanaan Pengawasan Koperasi

Pengawasan yang baik dimulai dengan persiapan. Ini adalah tahap yang melibatkan sejumlah tindakan penting, seperti menyiapkan berkas yang diperlukan dan mengatur pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Mengumpulkan untuk dilihat oleh pihak anggota koperasi meliputi laporan keuangan, anggaran, akta pendirian, hasil rapat anggota tahunan dan catatan kegiatan adalah bagian dari menyiapkan berkas. Selama periode waktu tertentu, dokumen ini akan digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja koperasi. Menyusun jadwal pertemuan yang jelas juga penting, dengan tujuan dan topik yang akan dibahas. Pengurus koperasi dan perwakilan dari Dinas Koperasi juga hadir di pertemuan ini. Dengan mengatur rapat yang efektif, setiap pihak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dan memberikan informasi yang relevan selama proses pengawasan. Tahap pelaksanaan pengawasan dapat dimulai setelah tahap persiapan selesai. Tahap ini dimulai dengan menentukan masalah yang mungkin terjadi dalam pengelolaan koperasi. Masalah ini diidentifikasi dengan meninjau data saat ini dan berbicara dengan pengurus dan anggota untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, langkah penting untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kinerja koperasi adalah pengumpulan data. Catatan aktivitas, laporan keuangan, dan komentar anggota dapat menjadi sumber data ini. Di hal ini dikaji dengan melihat data yang dimiliki oleh

koperasi bahwa melalui dua macam bentuk yaitu Kertas Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi tertulis dan digital melalui software excel yang meliputi berbagai macam point-point pertanyaan koperasi yang variabelnya yaitu tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan, dan permodalan. Berikut contoh bentuk butir butir pertanyaan yang diajukan untuk pengawasan koperasi di gambar 3.

| BUTIR-BUTIR PERTANYAAN VARIABEL TATA KELOLA DAN PROFIL RISIKO | | | | | | |
|--|---|--------------|--|-----------------|-------|---|
| IDENTITAS KSP / USP | | | | | | |
| 1 | Nama Koperasi | : | KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN BANK MEGA | | | |
| 2 | No. Badan Hukum | : | 8660/09/II/96 | | | |
| 3 | Tgl. Badan Hukum | : | 18/11/1996 | | | |
| 4 | Alamat | : | Memara Bank Mega Surabaya, Kawasan Trans Icon, Jl. Frontage A. Yani No. 260 | | | |
| 5 | - Jalan | : | Sukalarifto | | | |
| 6 | - Desa/Kelurahan | : | Wonocolo | | | |
| 7 | - Kecamatan | : | Surabaya | | | |
| 8 | - Kabupaten/Kota | : | Jawa Timur | | | |
| 9 | - Provinsi | : | | | | |
| E. Indikator dan Butir Pertanyaan Variabel Tata Kelola dan Profil Risiko bagi KSP/USP Koperasi KUK I dan II | | | | | | |
| NO | VARIABEL DAN INDIKATOR PENGUKURAN | PERTANYAAN | INDIKATOR PENGUKURAN | KONDISI | NILAI | DOKUMEN PENDUKUNG DAN TEKNIK PEMERIKSAAN |
| A. TATA KELOLA | | | | | | |
| 1. PRINSIP KOPERASI | | | | | | |
| 18 | Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka | Pertanyaan 1 | Kepatuhan Koperasi untuk menerima (pengunduran anggota secara sukarela (tidak ada paksaan) yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga | Terpenuhi | 1 | Periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menyatakan koperasi menerima (pengunduran anggota secara sukarela (tidak ada paksaan) |
| 19 | | Pertanyaan 2 | Kepatuhan Koperasi untuk menerima (Pengunduran anggota secara terbuka (bagi semua etnis, suku agama dan lain-lain) yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga | Terpenuhi | 1 | Periksa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menyatakan koperasi menerima (pengunduran anggota secara terbuka (bagi semua etnis, suku agama dan lain-lain) |
| 20 | | Pertanyaan 3 | Jumlah tambahan anggota baru yang masuk lebih besar daripada jumlah anggota yang keluar/mengundurkan diri | tidak Terpenuhi | 0 | Periksa kondisi perkembangan anggota koperasi terkait dengan penambahan anggota masih lebih besar dibandingkan dengan anggota yang keluar/mengundurkan diri |
| 21 | | Pertanyaan 4 | Dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota valid | Terpenuhi | 1 | Periksa keabsahan dan validitas dokumen pendukung terkait dengan penerimaan dan pengunduran anggota |
| 22 | Pengelolaan dilakukan secara demokratis | Pertanyaan 5 | Kepatuhan Koperasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota | Terpenuhi | 1 | Periksa Kepatuhan Koperasi dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota |
| 23 | | Pertanyaan 6 | Kepatuhan Koperasi dalam pengelolaan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota | Terpenuhi | 1 | Periksa Kepatuhan Koperasi dalam pengelolaan koperasi, dilakukan oleh anggota secara demokratis One man one vote, dalam Rapat Anggota |

dan 377 ke 322

Gambar 3. Bentuk Digital Butir Butir Pertanyaan

Dijelaskan bahwa keterangan dari butir butir pertanyaan yang tersedia bahwa jika terpenuhi bernilai 1 sedangkan jika tidak terpenuhi maka bernilai 0. Dalam hal ini jika koperasi belum melakukan dan melaksanakan sesuai dengan pertanyaan yang ada maka akan menjadi tugas wajib dari pelaksanaan koperasi itu sendiri. Dari aspek tata kelola meliputi dasar point 1. prinsip koperasi yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Kedua kelembagaan yang terdiri dari legalitas badan hukum koperasi, izin usaha simpan pinjam, anggaran dasar, keanggotaan dan kelengkapan organisasi. Ketiga yaitu manajemen terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen asset, manajemen likuiditas. Bahwa masing masing koperasi memiliki dasar pemenuhan yang berbeda beda terlihat dari pengelolaan koperasi sendiri.

| B PROFIL RISIKO *) | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---|-----------------|---|--|
| 1 RISIKO INHERN | | | | | | |
| 1 Risiko Operasional | | | | | | |
| a | Skala usaha dan struktur organisasi | Pertanyaan 1 | Skala usaha koperasi didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup dan memadai | Terpenuhi | 1 | Periksa dan cek dokumen yang menunjukkan skala usaha koperasi didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup dan memadai |
| | | Pertanyaan 2 | Struktur organisasi terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola Koperasi | Terpenuhi | 1 | Periksa struktur organisasi terpenuhi lengkap sesuai ketentuan tata kelola Koperasi |
| | | Pertanyaan 3 | Terdapat peran aktif dari pihak yang terdapat pada struktur organisasi koperasi | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah terdapat peran aktif dari pihak yang terdapat pada struktur organisasi koperasi |
| | | Pertanyaan 4 | Pihak yang tercantum dalam struktur organisasi memberikan kontribusi positif atas urusan tugas yang diberikan | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah pihak yang tercantum dalam struktur organisasi memberikan kontribusi positif atas urusan tugas yang diberikan |
| b | Keberagaman produk dan/jatau jasa | Pertanyaan 5 | Koperasi memiliki produk/jasa yang beragam selain kegiatan usaha utama | tidak Terpenuhi | 0 | Periksa apakah Koperasi memiliki produk/jasa yang beragam selain kegiatan usaha utama |
| | | Pertanyaan 6 | Layanan produk/jasa selain yang utama didukung dengan kemampuan dan keahlian internal koperasi | tidak Terpenuhi | 0 | Periksa apakah Layanan produk/jasa selain yang utama didukung dengan kemampuan dan keahlian internal koperasi |
| | | Pertanyaan 7 | Layanan produk/jasa selain yang utama masih sesuai dengan pelayanan utama koperasi | tidak Terpenuhi | 0 | Periksa apakah Layanan produk/jasa selain yang utama masih sesuai dengan pelayanan utama koperasi |
| | | Pertanyaan 8 | Ragam layanan produk/jasa dilaksanakan secara langsung dengan dukungan sumber daya koperasi | tidak Terpenuhi | 0 | Periksa apakah ragam layanan produk/jasa dilaksanakan secara langsung dengan dukungan sumber daya koperasi |
| 2 Risiko Kepatuhan | | | | | | |
| a | Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi | Pertanyaan 1 | Tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan koperasi selama periode penilaian | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan koperasi selama periode penilaian |
| | | Pertanyaan 2 | Koperasi tidak dalam hukuman sanksi | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah Koperasi tidak dalam hukuman sanksi |
| | | Pertanyaan 3 | Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi |
| | | Pertanyaan 4 | Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi dan berakibat kepada tindakan pidana | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah Koperasi tidak dalam proses hukum karena pelanggaran kepatuhan koperasi dan berakibat kepada tindakan pidana |
| b | Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran | Pertanyaan 5 | Ada evaluasi atas temuan pelanggaran sebelumnya | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah Ada evaluasi atas temuan pelanggaran sebelumnya |
| | | Pertanyaan 6 | Temuan pelanggaran ditindaklanjuti untuk perbaikan | Terpenuhi | 1 | Periksa apakah Temuan pelanggaran ditindaklanjuti untuk perbaikan |

Gambar 4. Pertanyaan dari Profil resiko Koperasi

Jika telah selesai dari butir butir pertanyaan yang bedasarkan point pertama bisa dilanjut dengan profil resiko yang terdiri dari resiko inheren yang terdiri dari resiko operasional terdiri dari dua pertanyaan yaitu skala usaha dan struktur organisasi dan keberagaman produk dan jasa. Masih dengan resiko operasional yang kedua resiko kepatuhan yang termasuk jenis signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi, signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Yang ketiga resiko likuiditas yaitu penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan. Berdasarkan hasil dari gambar 4 yang tertera pada butir butir pertanyaan.

Jika telah terpenuhi dari hasil butir butir pertanyaan tersebut dapat dilanjut dengan Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang masuk kedalam point Profil resiko disini terdapat empat macam yaitu kualitas penerapan manajemen risiko pinjaman/pembiayaan, kualitas penerapan manajemen risiko operasional, kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, dan kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas. Dibagian ini dari seluruh koperasi yang ada di Surabaya rata rata dapat diambil kesimpulan nilai yang tertera kebanyakan adalah 0 dikarenakan banyaknya koperasi yang belum memnuhi hal tersebut. Berikut butir-butir pertanyaan pada gambar 5 yang dialami oleh Koperasi Karyawan Bank Mega.

| II Penilaian dan Penetapan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) | | | | | | |
|---|---|---------------|---|-----------------|---|--|
| 1 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pinjaman/pembiayaan *) | | | | | | |
| 154 | a | Pertanyaan 1 | Pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko pembiayaan yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa pengawas telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh pengurus dan melakukan evaluasi secara berkala |
| 155 | | Pertanyaan 2 | Pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko pembiayaan secara berkala dan memastikan tidak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota. | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa pengawas melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban pengurus atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tidak lanjut hasil evaluasi pada rapat anggota. |
| 156 | | Pertanyaan 3 | Pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko pembiayaan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala? | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa pengurus telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkajian secara berkala? |
| 157 | | Pertanyaan 4 | Pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko pinjaman/pembiayaan. | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa pengurus memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi Risiko kredit. |
| 158 | b | Pertanyaan 5 | Koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi pembiayaan dan fungsi Manajemen Risiko pembiayaan ? | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan Fungsi Manajemen Risiko kredit |
| 159 | | Pertanyaan 6 | Koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko pembiayaan dan penetapan limit Risiko pembiayaan yang ditetapkan oleh pengurus | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa koperasi memiliki prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit Risiko kredit yang ditetapkan oleh pengurus |
| 160 | | Pertanyaan 7 | Pengurus telah menerapkan kebijakan pengendalian SDH dalam rangka penerapan Manajemen Risiko pembiayaan | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa pengurus telah menerapkan kebijakan pengendalian SDH dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit |
| 161 | c | Pertanyaan 8 | Koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko pinjaman/pembiayaan | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa koperasi telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mendukung pengurus dalam pengambilan keputusan terkait Risiko kredit |
| 162 | | Pertanyaan 9 | Sistem pengendalian intern terhadap Risiko pembiayaan telah dilaksanakan | Tidak Terpenuhi | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern terhadap Risiko kredit telah dilaksanakan |
| 163 | | Pertanyaan 10 | Koperasi memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan | Tidak | 0 | Periksa dokumen yang menunjukkan bahwa Koperasi memiliki kebijakan |

Gambar 5. Pertanyaan dari Profil Resiko Bagian (KPMR) Koperasi

Dimulai dari kualitas penerapan manajemen risiko pinjaman/pembiayaan, kualitas penerapan manajemen risiko operasional, kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, dan kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas. Dari keempat point tersebut yaitu terdiri dari pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, kebijakan prosedur dan limit resiko, proses dan sistem informasi manajemen resiko. Setelah selesai semua dilanjutkan dengan mengetahui keuangan koperasi dimulai dari perhitungan hasil usaha koperasi yang terdiri dari berbagai macam pendapatan dan beban yang ditanggung oleh koperasi. Selanjutnya neraca dimana terside dari asset lancar dan asset tidak lancar. Untuk yang terakhir dana sosial pengurus disini dapat dilihat dana keseluruhan dari volume usaha yang dimiliki koperasi.

Setelah pengawasan dilakukan, monitoring dan evaluasi adalah langkah berikutnya. Pada tahap ini, analisis data yang dikumpulkan sangat penting. Data yang dikumpulkan dari laporan keuangan, wawancara, dan umpan balik anggota akan dianalisis untuk menentukan pola-pola kinerja koperasi. Peneliti atau pengawas akan menilai seberapa efektif program yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan koperasi atau tidak sesuai dengan rencana.

Tahap evaluasi juga mencakup pengukuran hasil. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran ini adalah dengan membandingkan kinerja koperasi sebelum dan sesudah penerapan program pengawasan. Peningkatan pendapatan, keterlibatan anggota, dan kepuasan anggota dengan manajemen koperasi adalah beberapa indikator kinerja yang dapat digunakan. Sistem pengendalian umpan balik biasanya berfokus kepada hasil-hasil akhir

sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. (Rizki & , Khairinal, 2018). Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya menunjukkan apa yang telah dicapai tetapi juga memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan. Analisis data dan pengukuran yang dihasilkan akan membantu pengurus dan kantor koperasi membuat kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan operasi mereka.

| NO | INDIKATOR | SKOR | BOUNDS | BOUNDS | BOUNDS | PREDIKAT |
|-----|--|----------|--------|--------|------------------------|----------|
| 43 | KINERJA KEUANGAN | 34 | 1,69 | #### | CUKUP SEHAT | G |
| 44 | I. KUALITAS KEUANGAN | 5 | 1,00 | #### | SEHAT | G |
| 44 | RENTABILITAS | 3 | 1,00 | #### | SEHAT | G |
| 70 | a. Rentabilitas Aset (Return on Asset) | 12,06% | 1 | 4 | Sehat | G |
| 71 | b. Rentabilitas Ekuitas (Return on Equity) | 12,20% | 1 | 4 | Sehat | G |
| 72 | c. Kemandirian Operasional | 1434,86% | 1 | 4 | Sehat | G |
| 73 | EFISIENSI | 2 | 1,00 | #### | SEHAT | E |
| 74 | a. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 6,37% | 1 | 4 | Sehat | E |
| 75 | b. Biaya Usaha terhadap SBU Kotor | 3,30% | 1 | 4 | Sehat | E |
| 76 | II. MANAJEMEN KEUANGAN | 10 | 1,67 | #### | SEHAT | A |
| 77 | I. KUALITAS ASET | 4 | 1,33 | 91,67 | SEHAT | A |
| 78 | a. Pinjaman pada Anggota terhadap Total Piutang | 95,67% | 1 | 4 | Sehat | A |
| 79 | b. Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Piutang | 5,37% | 2 | 3 | Cukup Sehat | A |
| 80 | c. Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah | 90,00% | 1 | 4 | Sehat | A |
| 81 | LIKUIDITAS | 6 | 2,00 | #### | CUKUP SEHAT | L |
| 82 | a. Kas dan Bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek | 5236,63% | 1 | 4 | Sehat | L |
| 83 | b. Piutang terhadap dana yang diterima | 41,13% | 4 | 1 | Tidak Sehat | L |
| 84 | c. Aset Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek | 8569,52% | 1 | 4 | Sehat | L |
| 85 | III. KESINAMBUNGAN KEUANGAN | 19 | 2,71 | 57,14 | DALAM PENGAWASAN | G |
| 86 | PERTUMBUHAN | 13 | 3,25 | #### | ALAM PENGAWASAN KHUSUS | G |
| 87 | a. Pertumbuhan Aset | -30,46% | 4 | 1 | Tidak Sehat | G |
| 88 | b. Pertumbuhan Dana diterima | -30,74% | 4 | 1 | Tidak Sehat | G |
| 89 | c. Pertumbuhan Ekuitas | -30,79% | 4 | 1 | Tidak Sehat | G |
| 90 | d. Pertumbuhan Hasil Usaha Bersih | 17,25% | 1 | 4 | Sehat | G |
| 91 | ASPEK JATIDIRI | 6 | 2,00 | #### | CUKUP SEHAT | JD |
| 92 | a. Pendapatan Utama terhadap Total Pendapatan | 100,00% | 1 | 4 | Sehat | JD |
| 93 | b. SHU Bersih terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib | 3,37% | 4 | 1 | Tidak Sehat | JD |
| 94 | c. Partisipasi Simpanan Anggota | 100,00% | 1 | 4 | Sehat | JD |
| 95 | PERAWATAN | 7 | 1,75 | 31,25 | SEHAT | C |
| 96 | I. KECEKUPAN PERMODALAN | 2 | 1,00 | #### | SEHAT | C |
| 97 | a. Ekuitas terhadap Total Aset | 98,83% | 1 | 4 | Sehat | C |
| 98 | b. Kecukupan Modal | 284,35% | 1 | 4 | Sehat | C |
| 99 | II. KECEKUPAN PENGELOLAAN PERMODALAN | 5 | 2,50 | #### | DALAM PENGAWASAN | C |
| 100 | a. Modal Pinjaman Anggota terhadap Total Aset | 0,00% | 4 | 1 | Tidak Sehat | C |
| 101 | b. Kewajiban Jangka Panjang terhadap Ekuitas | 0,00% | 1 | 4 | Sehat | C |
| 102 | NILAI SKOR & PREDIKAT PEMERIKSAAN KESEHATAN | 140,00 | 1,63 | 72,42 | CUKUP SEHAT | |
| 103 | TATA KELOLA | 30% | #### | 21,62 | | |
| 104 | PROFIL RISIKO | 15% | #### | 7,50 | | |
| 105 | KINERJA KEUANGAN | 40% | #### | 31,11 | | |
| 106 | PERMODALAN | 15% | 81,25 | 12,19 | | |
| 107 | | 100% | | #### | | |

Gambar 6. Hasil Penilaian Pengawasan Koperasi Dimana bahwa pada gamabr 6 ditunjukkan hasil yang dialami sekarang oleh koperasi. Dimana setelah proses penilaian skor dan predikat pemeriksaan kesehatan koperasi muncul dari Dinas Koperasi menjelaskan dari aspek-aspek yang terpenuhi dan tidak terpenuhi dari empat aspek tersebut. Dari hal tersebut dapat ditinjau lebih dalam apa yang perlu diperbaiki dan dapat dilakukan kedepannya agar koperasi menjadi lebih baik.

Tabel 1. Predikat Akhir Koperasi

| SCORE | PREDIKAT |
|----------------------|-------------------------|
| $80 \leq x \leq 100$ | Sehat |
| $66 \leq x < 80$ | Cukup Sehat |
| $51 \leq x < 66$ | Dalam Pengawasan |
| < 51 | Dalam Pengawasan Khusus |

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa dasar dikatakannya koperasi sehat bernilai lebih dari 80 sampai 100, cukup sehat bernilai dari lebih dari 66 sampai 80, dalam penawasan ini dapat dikatakan bahwa koperasi sedang tidak baik-baik saja karena terdapat banyak kekurangan dalam operasional koperasi yang bernilai lebih dari 51 sampai 66, dan yang terakhir dalam pengawasan khusus dimana bahwa koperasi diambang krisis pembubaran dalam arti koperasi sudah tidak dapat bertahan lagi dikarenakan banyaknya segi operasional yang kurang dan keuangan yang bermasalah bernilai kurang dari 51. Setelah penyampain hasil selesai oleh Dinas Koperasi kepada Koperasi langkah selanjutnya dari Dinas Koperasi akan membuat hasil pengawasan yang telah dilakukan berupa dokumen surat hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan yang akan dikirim langsung melalui pesan digital.

KESIMPULAN

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa optimalisasi peran Dinas Koperasi melalui pengawasan yang efektif berdampak signifikan terhadap keberlanjutan operasional koperasi. Pengawasan yang terorganisir tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol tetapi juga mendorong perbaikan dalam manajemen, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan. Dengan pengawasan yang baik, koperasi dapat menciptakan lingkungan partisipatif yang mendukung keberlanjutan operasional meskipun menghadapi berbagai tantangan. Program pengawasan juga berhasil meningkatkan kinerja keuangan koperasi, memungkinkan pengurus mengelola sumber daya secara lebih efisien dan memanfaatkan pelatihan rutin untuk menerapkan prinsip manajemen yang lebih baik.

Namun, temuan juga mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya di Dinas Koperasi menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas Dinas Koperasi dan pengembangan sistem pemantauan yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan pengawasan yang lebih teratur dan mendalam, koperasi diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat luas. Pengabdian ini diharapkan menjadi referensi bagi Dinas Koperasi dan pengurus koperasi

dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan koperasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyantiningih, F., Pramesthi, R. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., Abdurachman, U., & Situbondo, S. (2023). Cooperative Management Training in the Framework of Developing Cooperative Functions As Social Teacher of the Economy Within the Scope of Kopma Students of the Faculty of Economics and Business University of Abdurachman Saleh Situbondo. *Jurnal Pengabdian*, 2(2), 541–552.
- Fauziah, R. A., Umarni, Y., & Setiawan, M. B. (2023). Pendampingan Manajemen Keanggotaan Koperasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi, Sosial Sains Dan Sosial Humaniora, Koperasi Dan Kewirausahaan (MOCCI)*, 1(2), 76–83.
<https://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/jpmmocci/article/view/49%0Ahttps://jurnal.alahyansukabumi.com/index.php/jpmmocci/article/download/49/47>
- Indonesia, P. R. (1945). *Peraturan Permenkop Tentang Perkoperasian (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992)* (Issue 1).
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). *Www.Penerbitwidina.Com*
Www.Penerbitwidina.Com.
- Mardiana, Asriati, N., & Syahrudin, H. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 9(1), 1–8.
- Maria Ernestina Da Rato, Wilhelmina Mitan, & Paulus Libu Lamawitak. (2023). Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada KSP Kopdit Suru Pudi Koting). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(1), 238–250. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1149>
- Rizki, R. I., & , Khairinal, F. K. (2018). *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Koperasi Unit Desa Berdikari Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari*. 1–15.
- Rizkiawan, T. (2023). Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), 346–359.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art9>
- Siregar, A. P., Pertanian, F., & Mada, U. G. (2020). *Kinerja koperasi di indonesia*. 5(1), 31– 38.
- Siti, R. (2014). Analisis Manajemen Koperasi dalam Meningkatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) (Kasus Koperasi Mitra Sejati Pangkalan Kuras). *Jom FISIP*, 1, 2.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETU_NGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI